

***SUSTAINABILITY REPORTING, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, AND  
TAX AVOIDANCE***

***SUSTAINABILITY REPORTING, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN  
TAX AVOIDANCE***

**Vainaya Najwanadia<sup>1</sup>, Zulfikar<sup>2\*</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1,2</sup>

[b200220301@student.ums.ac.id](mailto:b200220301@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [zulfikar@ums.ac.id](mailto:zulfikar@ums.ac.id)<sup>2\*</sup>

**ABSTRACT**

*Focusing on the Consumer Non-Cyclical sector on the Indonesia Stock Exchange (2021–2023), this study investigates how Corporate Sustainability Reporting and Good Corporate Governance (GCG) affect tax avoidance. Tax avoidance is proxied by the Cash Effective Tax Rate (CETR), while GCG is represented by board size, institutional stakes, independent commissioners, and the audit committee. Through a quantitative causal method and purposive sampling, 163 observations from 57 firms were analyzed using SPSS-based multiple regression. The results indicate that sustainability disclosures and the number of directors significantly drive tax avoidance policies. However, other GCG elements like institutional ownership and independent oversight did not yield significant results. Profitability and leverage also played a crucial role in tax-related decisions. The findings imply that sustainability transparency is key, yet traditional monitoring functions require further optimization to effectively curb tax avoidance. This research serves as a reference for improving corporate governance and tax adherence.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Sustainability Reporting, Good Corporate Governance, Institutional Ownership, Audit Committee

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh *corporate sustainability reporting* dan mekanisme *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Mekanisme *Good Corporate Governance* dikaji melalui jumlah dewan direksi, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit, sedangkan *tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Penelitian mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Sampel penelitian didapatkan melalui metode *purposive sampling* sehingga menghasilkan 57 perusahaan dengan total 163 observasi. Data dimanfaatkan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Temuan menginformasikan bahwasanya *corporate sustainability reporting* dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Sementara itu, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, variabel kontrol profitabilitas dan leverage terbukti berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Studi juga membuktikan bahwasanya transparansi pelaporan keberlanjutan dan peran strategis manajemen memiliki kontribusi dalam memengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan, sementara efektivitas mekanisme pengawasan formal masih belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi regulator dan manajemen perusahaan dalam memperkuat kualitas tata kelola perusahaan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

**Kata Kunci:** Tax Avoidance, Sustainability Reporting, Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Komite Audit

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan informasi dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak per 26 Desember 2021, penerimaan pajak dalam APBN 2021 berhasil memenuhi target, yakni sebesar Rp1.231,87 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Capaian ini menunjukkan peran penting pajak sebagai salah satu sumber utama pembiayaan negara. Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai hambatan, terutama perilaku sebagian wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajaknya Perusahaan umumnya melihat

dan mengidentifikasi celah pada ketentuan perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak secara legal, prosedur diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hingis Sangian et al., n.d.). Di sisi lain, terdapat pula bentuk pengurangan pajak secara ilegal melalui pelanggaran ketentuan yang berlaku, yang disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). (Ramdiani et al., 2023)

Fenomena penghindaran pajak berakar pada kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan pajak, mengingat pajak dianggap sebagai pengeluaran yang mengurangi ketersediaan laba bagi pemegang saham, sementara pemerintah mengandalkannya sebagai sumber utama pendapatan negara (Fitriani & Sulistyawati, 2020). *Tax avoidance* merupakan strategi legal untuk menekan kewajiban pajak, namun sering menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan mencerminkan lemahnya transparansi (Hanlon & Heitzman, 2010). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dipengaruhi faktor internal, seperti sustainability reporting yang dapat menekan kecenderungan penghindaran pajak melalui tekanan reputasi (Lesmana et al., 2024), serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang solid guna memperketat pengawasan dan mengurangi praktik agresif manajemen (Sahetapy et al., 2025).

*Corporate Sustainability Reporting* (CSR) merupakan pengungkapan sukarela kinerja non-keuangan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mengoptimalkan transparansi serta menunjukkan komitmen keberlanjutan (Meutia et al., 2022). Korelasi CSR dengan *tax avoidance* masih mengindikasikan temuan yang bertolak belakang. Beberapa studi membuktikan

bahwasanya pengungkapan CSR justru berkorelasi positif dengan penghindaran pajak karena digunakan sebagai sarana legitimasi atau pencitraan untuk menutupi kebijakan pajak agresif (Septianto & Muid, 2020, Achmad Hidayat & Novita, 2023). Sebaliknya, studi lain menyatakan bahwa CSR dapat menekan *tax avoidance* melalui peningkatan transparansi dan tekanan reputasi (Wulandari et al., 2025), bahkan ada penelitian yang tidak menemukan hubungan signifikan antara keduanya (Wiratmoko, 2018). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya terkait perbedaan antara CSR yang bersifat substansial dan simbolik serta pengaruh konteks sektor industri, yang dalam temuan diarahkan pada sektor *consumer non-cyclical*.

*Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan perusahaan sebagai upaya meminimalkan risiko dan memastikan pengelolaan yang transparan serta akuntabel. GCG hadir sebagai solusi pengawasan guna memitigasi konflik kepentingan antara manajemen dan stakeholder, melalui peran aktif dewan komisaris serta tekanan dari pasar dan regulator (Tendi Haruman, 2008, Phillips, 2005, Pratama & Nuryaman, 2024).

Peneliti memfokuskan variabel GCG pada aspek internal seperti dewan direksi dan kepemilikan manajerial, sementara aspek eksternal ditinjau melalui tingkat kepemilikan institusional. Temuan sebelumnya mengindikasikan perolehan beragam, di mana kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* sementara kepemilikan institusional tidak berpengaruh (Wiratmoko, 2018), bahkan ada studi yang menyatakan GCG tidak mampu menekan penghindaran pajak (Syahrul et al., 2023). Studi lain juga menunjukkan hasil berbeda terkait dewan direksi, yang dalam beberapa

penelitian terbukti dapat mengurangi *tax avoidance* (Lifti Purba et al., 2021), namun pada penelitian lain tidak berpengaruh signifikan (Hudha & Utomo, 2021).

Kajian sebelumnya mengonfirmasi variasi temuan berlandaskan sektor industri dan pendekatan pengukuran. Lifti Purba et al. (2021) pada sektor asuransi menemukan pengaruh signifikan dewan direksi terhadap *tax avoidance*, sedangkan Adityaputra (2024) pada subsektor batubara tidak menemukan pengaruh signifikan, yang mengindikasikan adanya perbedaan efek antar industri. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada keberadaan dewan, bukan karakteristiknya seperti ukuran, frekuensi rapat, dan latar belakang, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh atribut dewan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis karakteristik struktural dewan direksi secara lebih rinci, khususnya pada sektor dengan regulasi padat.

Temuan terkait kepemilikan institusional juga belum konsisten. Hendrianto (2022) menemukan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan institusi dapat mendukung efisiensi laba jangka pendek. Sebaliknya, Lokahita & Saputri (2024) serta Damayanti & Wulandari (2021) menemukan pengaruh negatif, di mana kepemilikan institusional berperan dalam membatasi praktik penghindaran pajak.

Sejumlah studi, seperti Haloho (2021), tidak membuktikan korelasi signifikan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Perbedaan temuan diduga dipengaruhi oleh karakteristik institusi, seperti jenis, tujuan investasi, dan tingkat pengawasan terhadap manajemen. Namun, sebagian

besar penelitian masih mengukur kepemilikan institusional hanya berdasarkan persentase saham tanpa mempertimbangkan karakter dan interaksinya dengan mekanisme tata kelola lain. Sehubungan dengan hal itu, studi berupaya menguji kembali kaitan tersebut melalui prosedur analisis yang lebih kontekstual.

Selain itu, peran dewan komisaris independen sebagai pengawas diharapkan dapat menekan penghindaran pajak, meskipun Mahmudi & Lismawati (2024) menemukan bahwasanya proporsinya tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Temuan mengenai dewan komisaris independen juga belum konsisten. Chandra (2022) menyatakan bahwa komisaris independen dapat menekan *tax avoidance*, namun sebagian besar studi hanya mengukur proporsinya tanpa mempertimbangkan kualitas, latar belakang profesional, dan keterlibatan aktifnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran komisaris independen secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitas pengawasan.

Hasil penelitian terkait komite audit juga beragam. Wiratmoko (2018) serta Purnomo & Eriandani (2022) menemukan komite audit efektif dalam menekan *tax avoidance*, sedangkan Sartika Wulandari (2024) dan Rusdiani (2023) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Perbedaan ini diduga karena pengukuran sebelumnya lebih berfokus pada aspek formal seperti jumlah anggota, tanpa menilai efektivitas, kompetensi, dan independensi. Dengan meninjau frekuensi rapat dan kompetensi teknis, temuan bermaksud mengisi celah terkait efektivitas peran pengawasan komite audit terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Penentu kebijakan penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada dimensi tata kelola dan transparansi laporan keberlanjutan perusahaan, tetapi juga oleh kondisi keuangan internal perusahaan. Oleh karena itu, profitabilitas dan leverage penting dikendalikan agar hubungan kausal yang diuji tidak bias. Profitabilitas yang diprosikan dengan Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin tinggi ROA, semakin besar beban pajak yang ditanggung sehingga mendorong insentif melakukan perencanaan pajak (Noviyani & Muid, 2019). Selain itu, mekanisme *tax shield* yang berasal dari bunga pinjaman menjadikan *leverage* sebagai instrumen strategis bagi perusahaan untuk menekan beban pajak terutang secara legal (Noviyani & Muid, 2019).

Studi menawarkan kebaruan dengan menganalisis *tax avoidance* melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan menguji secara simultan sustainability reporting, dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung menguji variabel secara parsial, studi ini juga mengendalikan faktor keuangan internal seperti profitabilitas dan leverage agar hasil analisis lebih akurat. Menggunakan sampel perusahaan *Consumer Non-Cyclical* periode 2021–2023 (pascapandemi) serta pengukuran yang relevan seperti indeks GRI, kontribusi utama studi terletak pada penyediaan data empiris yang mendukung perbaikan tata kelola serta penyusunan strategi kebijakan perpajakan perusahaan yang lebih akuntabel.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan

Kerangka teoretis studi berpijak pada Teori Keagenan sebagaimana yang dipelopori oleh Jensen dan Meckling (1976), mereka mengungkap bahwasanya perusahaan yakni hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Masalah keagenan ini berakar pada potensi konflik kepentingan, mengingat agen mempunyai motivasi tersendiri yang mungkin bertolak belakang dengan visi prinsipal. Ketika informasi tidak simetris dan pengawasan tidak memadai, agent dapat bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, contohnya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### Teori Legitimasi

Dalam kerangka Teori Legitimasi, perusahaan berusaha memvalidasi keberadaannya dengan memastikan setiap tindakan korporasi tidak melanggar kontrak sosial dan norma yang ada. Teori ini mengaitkan daya tahan korporasi dengan kemampuannya dalam meraih dan mempertahankan penerimaan sosial dari masyarakat luas. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha menyesuaikan tindakan dan pengungkapannya agar selaras dengan ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan (Dowling & Pfeffer, 1975).

### Corporate Sustainability Reporting

Sustainability reporting atau pelaporan keberlanjutan merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola yang berkelanjutan. Dari sudut pandang teori keagenan, laporan ini bertujuan mengurangi ketimpangan informasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan menekan perilaku oportunistik seperti penghindaran (Alfatlah et al.,

2022) Perusahaan yang aktif dalam pelaporan keberlanjutan cenderung menghindari praktik yang dapat merusak reputasi, termasuk *tax avoidance* yang agresif.

Temuan empiris menginformasikan perolehan yang berbeda terkait pengaruh sustainability reporting terhadap *tax avoidance*. Beberapa studi menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan berkontribusi menurunkan penghindaran pajak karena meningkatkan pengawasan eksternal dan internal (Alfatlah et al., 2022) Namun, ada pula yang menyatakan bahwa pelaporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai alat pencitraan (*greenwashing*) untuk mengalihkan perhatian dari praktik penghindaran pajak yang sebenarnya (Mulyati et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas sustainability reporting dalam mengendalikn *tax avoidance* sangat bergantung pada kualitas dan kejujuran pelaporan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah: **H1: Pengungkapan *sustainability reporting* dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

### **Jumlah Dewan Direksi**

Dewan direksi berotoritas strategis dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan fiskal dan perencanaan pajak. Beberapa penelitian menjelaskan terkait dewan direksi yang berperan mengurangi praktik *tax avoidance*.

Penelitian oleh Lifti Purba S, Natalitha Y, Sembiring B (2021) menghasilkan temuan

dewan direksi berperan positif secara parsial terhadap *tax avoidance*. Artinya, keberadaan dewan direksi justru mendorong praktik penghindaran pajak karena keputusan strategis fiskal sering kali berada di bawah kendali mereka. Hasil serupa juga ditemukan oleh

Adityaputra, (2024) yang mengindikasikan bahwasanya dewan direksi secara signifikan dan positif memengaruhi tingkat *tax avoidance*, dengan alasan bahwa meningkatnya kekuasaan manajemen, maka meningkat pula fleksibilitas yang dimiliki untuk melakukan penghindaran pajak yang sah. Namun, temuan berbeda diungkapkan oleh Hudha B, Utomo D (2021) yang mengindikasikan bahwasanya dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berlandaskan paparan tersebut, diformulasikan hipotesis berikut:

**H2: Jumlah dewan direksi dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

### **Presentase Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional berperan sebagai pengawas utama terhadap manajemen. Dalam kerangka agency theory, institusi sebagai pemilik besar memiliki kepentingan yang kuat untuk memastikan manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan pemilik, termasuk meminimalkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berpotensi merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya (Rahmawati et al., 2016). Institusi yang memiliki porsi saham signifikan biasanya memiliki aset dan akses informasi mumpuni yang bertujuan untuk melakukan pengawasan efektif sehingga dapat menekan perilaku oportunistik manajemen. (Ruddian, 2017)

Namun, menurut penelitian tentang keterkaitan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* masih beragam. Beberapa studi menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak, artinya tingginya kepemilikan institusional, dapat mengurangi kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak

(Hendrianto, 2022) Hal ini karena institusi mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Sebaliknya, penelitian lain justru menemukan pengaruh positif, di mana kepemilikan institusional yang besar memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur tax planning yang dapat meningkatkan *tax avoidance* (Sahetapy et al., 2025) Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

**H3: Presentase kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

### **Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI)**

Dewan komisaris independen yakni proksi *corporate governance* yang berfungsi mengawasi eksternal terhadap manajemen perusahaan. Dalam perspektif agency theory, komisaris independen berkedudukan krusial dalam menjembatani kesenjangan informasi dan mengontrol perilaku oportunistik pengelola perusahaan guna mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak etis (Pratama & Nuryaman, 2024) penguatan akuntabilitas melalui peran komisaris independen yang imparial terbukti mampu mempersempit ruang bagi manajemen dalam mengimplementasikan kebijakan penghindaran pajak demi keuntungan jangka pendek.

Namun, efektivitas komisaris independen dalam mengendalikan *tax avoidance* masih menjadi perdebatan dalam penelitian empiris. Beberapa studi menunjukkan bahwa komisaris independen dapat mengurangi aktivitas *tax avoidance* (Mahmudi & Lismawati, 2024). Sebaliknya, penelitian lain mengatakan bahwa pengaruh variabel DKI tidak dapat mengurangi praktik *tax avoidance* (Fauzan et al., 2021) Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan kualitas

pengawasan, komitmen komisaris, atau kondisi perusahaan yang berbeda-beda, sehingga peran komisaris independen harus diidentifikasi dalam konteks yang lebih luas dan terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah:

**H4: Proporsi dewan komisaris independen dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

### **Jumlah Komite Audit**

Sebagai komponen esensial dari mekanisme kontrol internal, komite audit bertanggung jawab dalam memvalidasi keselarasan antara praktik pelaporan perusahaan dengan standar akuntansi dan hukum, termasuk kebijakan perpajakan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa komite audit berperan signifikan dalam menekan praktik *tax avoidance*. Wiratmoko (2018) dalam penelitiannya menyatakan keberadaan komite audit yang baik secara signifikan dapat membantu mengurangi praktik *tax avoidance* karena meningkatkan pengawasan terhadap regulasi dan aturan perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh Syahroul P, Afandi A, Fajarudin I (2023) yang mengindikasikan bahwasanya jumlah dan kualitas audit dapat berkontribusi terhadap penurunan intensitas aktivitas *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, berikut hipotesisnya:

**H5: Jumlah komite audit dapat mengurangi praktik *tax avoidance***

### **METODE PENELITIAN**

Analisis ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dengan desain studi asosiatif yang ditujukan menganalisis pengaruh *Corporate Sustainability Reporting* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *tax avoidance*. Studi mengandalkan ketersediaan data sekunder yang diekstraksi dari laporan

tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan di industri *Consumer Non-Cyclical* pada periode observasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sesuai kriteria perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan serta memiliki data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian.

Penghindaran pajak diposisikan sebagai variabel terikat, di mana pengukurannya didasarkan pada angka ETR yang diperoleh dari rasio kas yang dibayarkan untuk pajak terhadap laba sebelum pajak).

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Jumlah beban pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Variabel independen meliputi *Corporate Sustainability Reporting* merupakan pengungkapan sukarela perusahaan terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan, yang diukur menggunakan indeks pengungkapan CSR.

$$\text{CSRDI} = \frac{\sum x_i}{N}$$

Dewan direksi bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan, termasuk pengambilan keputusan strategis pajak.

$$\text{DD} = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

Tingkat kepemilikan institusional ditunjukkan oleh porsi saham yang dikelola oleh lembaga finansial, yang seringkali memiliki kapasitas pengawasan lebih tinggi, dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan perusahaan.

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} * 100$$

Dewan komisaris independen berfungsi mengawasi manajemen secara

objektif dan bebas dari pengaruh internal perusahaan.

$$\text{DKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

Komite audit yang aktif dan kompeten dapat mengurangi praktik *tax avoidance* melalui pengawasan internal dan peningkatan kepatuhan perpajakan.

$$\text{KA} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi *Return on Assets* (ROA) dan leverage. ROA diaplikasikan guna meninjau efektivitas perusahaan dalam memutar aset, sedangkan leverage mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai operasional serta kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad \text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Teknik analisis data yang diaplikasikan yakni analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif sampel

Studi memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Dari total populasi 132 perusahaan, dipilih 57 perusahaan sebagai sampel menggunakan metode *purposive sampling* sesuai kriteria penelitian. Dengan periode pengamatan selama tiga tahun, diperoleh 171 laporan keuangan sebagai unit analisis.

**Tabel 1.Deskriptif Sampel**

NO	Keterangan	Tidak lolos	Lolos
1.	Perusahaan <i>consumer non-cyclical</i> yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (populasi saat ini)	0	132
2.	Perusahaan <i>consumer non-cyclical</i> yang aktif diperdagangkan dan tercatat di bursa efek periode 2021 sampai 2023	(37)	95
3.	Perusahaan <i>consumer non-cyclical</i> yang rutin merilis laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan periode 2021 sampai 2023	(2)	93
4.	Perusahaan <i>consumer non-cyclical</i> yang menggunakan mata uang rupiah	(4)	89
5.	Perusahaan <i>consumer non-cyclical</i> yang rutin memperoleh laba tahun 2021 sampai 2023	(32)	60
Jumlah Perusahaan		57	
Jumlah Periode Penelitian		3	
Jumlah Sampel Penelitian		171	
Data di outlier		(8)	
Data yang diolah		163	

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

### Analisis Statistik Deskriptif

Berlandaskan perolehan sampel yang diolah dapat diketahui hasil

statistik deskriptif tiap variabel yakni sebagai berikut :

**Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	163	0.03257	0.72486	0.2366369	0.07839024
CSRDI	163	0.18681	0.73626	0.4460999	0.10342996
DD	163	2	11	4.84	2.194
KI	163	0.00000	0.99994	0.7398103	0.28682880
DKI	163	0.20000	1.00000	0.4330412	0.11835344
KA	163	2	4	3.01	0.222
ROA	163	0.37723	34.30968	10.0000837	7.14541372
LAV	163	0.02684	4.92782	0.4316139	0.43169869
Valid N (listwise)	163				

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Berlandaskan uji statistik deskriptif terhadap 163 observasi, *Tax avoidance* memiliki rata-rata 0,2364 dengan sebaran relatif homogen. CSRDI menunjukkan rata-rata 0,4461 yang mengindikasikan tingkat pengungkapan CSR berada pada kategori sedang. Jumlah Dewan Direksi bervariasi antara

2–11 orang dengan rata-rata 4,84, sedangkan Kepemilikan Institusional memiliki rata-rata tinggi sebesar 0,7398 meskipun dengan variasi yang cukup besar. Proporsi Dewan Komisaris Independen relatif stabil dengan rata-rata 0,4334, dan Komite Audit rata-rata berjumlah 3 orang, sesuai praktik tata

kelola umum. Sementara itu, ROA dan Leverage menunjukkan variasi yang lebih tinggi dibandingkan variabel lain, yang menandakan perbedaan kinerja keuangan dan tingkat penggunaan utang antar perusahaan. Secara umum, sebagian besar variabel memiliki sebaran data yang relatif baik.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Dengan jumlah 163 observasi, distribusi sampling estimator regresi dapat diasumsikan mendekati normal berdasarkan Central Limit Theorem. Oleh karena itu, analisis regresi linier serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F tetap dapat dilakukan dan dianggap memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 3. Uji Normalitas**

Jumlah Sampel	Central Limit Theorem (CLT)	Keterangan
163	<30	Terdistribusi Normal

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

**Uji Multikolinearitas**

Berdasarkan hasil olah data dari sampel yang digunakan dapat diketahui bahwa uji

multikolinearitas menunjukkan hasil seperti dalam tabel berikut :

**Table 4. Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
SRDI	0.968	1.033	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DD	0.908	1.101	Tidak Terjadi Multikolinearitas
KI	0.917	1.090	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DKI	0.956	1.046	Tidak Terjadi Multikolinearitas
KA	0.967	1.035	Tidak Terjadi Multikolinearitas
ROA	0.976	1.025	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LAV	0.943	1.061	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Perolehan uji multikolinearitas mengindikasikan bahwasanya keseluruhan variabel berada diangka VIF > 0,1 dan angka tolerance < 10 jadi terkonfirmasi keseluruhan variabel lolos dari pengujian multikolinearitas antara variabel independen.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas ditujukan guna mengidentifikasi varians residual pada model regresi bersifat konstan. Pengujian dilaksanakan mengaplikasikan metode Glejser dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	0.047	0.058		0.801	0.424
CSRDI	0.038	0.039	0.073	0.973	0.332
DD	-0.003	0.002	-0.117	-1.518	0.131
KI	0.004	0.014	0.022	0.286	0.775
DKI	0.042	0.034	0.093	1.238	0.217
KA	-0.012	0.018	-0.051	-0.684	0.495
ROA	-0.001	0.001	-0.133	-1.785	0.076
LAV	0.043	0.009	0.348	4.585	0.147

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Perolehan uji heteroskedastisitas menginformasikan seluruh nilai

signifikansi di atas 0,05, sehingga tidak terdapat hubungan signifikan antara

variabel independen dan residual. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi klasik.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi diarahkan guna mengkaji adanya korelasi antara residual

pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi, terutama pada data runtut waktu. Pengujian dijalankan memanfaatkan metode Durbin-Watson dengan perolehan berikut:

**Tabel 6. Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.492 <sup>a</sup>	0.242	0.208	0.06977757	1.880

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Perolehan uji Durbin-Watson mengindikasikan angka DW 1,880. Melalui angka  $du = 1,8341$  dan  $4 - du = 2,1659$ , posisi DW pada rentang  $du < DW < 4 - du$ , analisis mengonfirmasi tidak adanya korelasi antar-residual dalam model regresi, sehingga asumsi dasar independensi terpenuhi dan model layak digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Fokus pengujian koefisien determinasi yakni guna memvalidasi seberapa dominan peran variabel independen dalam memengaruhi dinamika variabel dependen. Berikut perolehan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ):

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.492 <sup>a</sup>	0.242	0.208	0.06977757

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Perolehan uji koefisien determinasi menginformasikan angka *R Square* 0,242, rendahnya persentase pengaruh (24,2%) mengonfirmasi bahwa sebagian besar perilaku penghindaran pajak perusahaan (75,8%) ditentukan oleh elemen di luar kerangka penelitian saat ini. Angka *Adjusted R Square* diangka 0,208 mengindikasikan kemampuan penjelasan model setelah penyesuaian 20,8%. Disamping itu, angka R 0,492 mengindikasikan interaksi simultan yang berada pada kategori sedang, sehingga model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup namun belum optimal.

### Uji F

Esensi dari uji F yakni guna memverifikasi signifikansi kolektif dari serangkaian variabel bebas terhadap fluktuasi variabel terikat dalam model regresi. Perolehan uji F menginformasikan angka F hitung 7,066 dengan signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ), maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak (fit) dan dapat dilanjutkan ke uji parsial (uji t). Berikut rincian perolehan uji F :

**Tabel 8. Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.241	7	0.034	7.066	0.000 <sup>b</sup>
Residual	0.755	155	0.005		
Total	0.995	162			

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

signifikansi diinformasikan pada tabel berikut :

### Uji Hipotesis

Perolehan pengujian hipotesis secara parsial dan perolehan angka

**Tabel 9. Uji Hipotesis**

	Beta	t	Sig.	Keterangan
(Constant)		3.318	0.001	
SRDI	0.183	2.575	0.011	H1 diterima
DD	-0.187	-2.543	0.012	H2 diterima
KI	0.046	0.624	0.533	H3 ditolak
DKI	0.107	1.497	0.136	H4 ditolak
KA	-0.073	-1.020	0.309	H5 ditolak
ROA	-0.381	-5.378	0.000	
LAV	0.229	3.175	0.002	

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Berlandaskan perolehan analisis regresi linier berganda, diformulasikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = 0,268 + 0,139 \text{ CSRDI} - 0,007 \text{ DD} + 0,012 \text{ KI} + 0,071 \text{ DKI} - 0,026 \text{ KA} - 0,004 \text{ ROA} + 0,042 \text{ LAV} + e$$

Angka konstanta 0,268 mengindikasikan bahwasanya jika seluruh variabel independen diasumsikan konstan, maka variabel *tax avoidance* diprediksi akan berada pada posisi nilai tersebut. Hasil regresi menunjukkan bahwa corporate sustainability reporting yang diprosikan dengan CSRDI mempunyai koefisien 0,139, angka signifikansi 0,011, dimana mengindikasikan adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan direksi juga menginformasikan pengaruh signifikan dimana koefisien -0,007 dan angka signifikansi 0,012, yang mengindikasikan ekspansi jumlah personel dalam jajaran direksi terbukti mampu memitigasi aktivitas penghindaran pajak guna menjaga kepatuhan fiskal korporasi.

Sebaliknya, kepemilikan institusional berada diangka koefisien 0,012, angka signifikansi 0,533, dewan komisaris independen 0,071 dan angka sig 0,136, serta komite audit -0,026 dan angka sig 0,309. Angka sig melampaui 0,05, menginformasikan ketiga variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel kontrol ROA terbukti berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap praktik penghindaran pajak, ditunjukkan koefisien -0,004 dan angka p value 0,000. Sementara itu, leverage diangka koefisien 0,042 dengan angka signifikansi 0,002, dimana mengindikasikan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

### PEMBAHASAN

**H1: Pengungkapan *sustainability reporting* dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

Koefisien variabel *Corporate Sustainability Reporting* mengonfirmasi arah positif 0.183. Perolehan uji statistik

terhadap koefisien ini menginformasikan  $t$  hitung 2,575 melampaui  $t$  tabel atau angka signifikansi 0,011 lebih besar daripada taraf signifikansi yang ditentukan senilai 0,05. Dengan demikian koefisien variabel *Corporate Sustainability Reporting* disimpulkan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan H1 diterima. Artinya tinggi atau rendahnya pelaporan keberlanjutan perusahaan dapat menurunkan atau menaikkan besarnya *tax avoidance*.

Temuan memperkuat studi Alfatlah et al., (2022) yang menginformasikan menurunkan penghindaran pajak karena meningkatkan pengawasan eksternal dan internal.

**H2: Jumlah dewan direksi dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

Koefisien variabel Dewan Direksi (DD) mengonfirmasi arah negatif yakni diangka -0,187. Perolehan uji statistik terhadap koefisien mengindikasikan  $t$  hitung -2,543 melampaui  $t$  tabel dan angka sig 0,012 tidak mencapai taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, koefisien variabel DD berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance* (TA) dan H2 diterima. Maka ditegaskan, semakin besar jumlah anggota dewan, cenderung menurunkan besarnya *Tax avoidance* perusahaan. Temuan memperkuat kajian (Adityaputra, 2024) yang mengemukakan bahwasanya dewan direksi secara signifikan positif memengaruhi tingkat *tax avoidance*.

**H3: Kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

Koefisien variabel Kepemilikan Institusional (KI) mengonfirmasi arah positif 0,046. Namun, perolehan uji statistik terhadap koefisien mengindikasikan  $t$  hitung 0,624 tidak melampaui  $t$  tabel dan angka signifikansi 0,533 melampaui taraf signifikansi 0,05.

Dengan demikian, koefisien variabel KI tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* (TA) dan H3 ditolak. Artinya, tinggi atau rendahnya proporsi kepemilikan institusional tidak menurunkan atau besarnya *Tax avoidance*. Studi mendukung temuan (Putri et al., n.d.) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap naik atau turunnya upaya praktik *tax avoidance*

**H4: Proporsi dewan komisaris independen dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.**

Koefisien Dewan Komisaris Independen (DKI) mengonfirmasi arah positif 0,107. Perolehan uji statistik terhadap koefisien ini menginformasikan  $t$  hitung 1,497 tidak melampaui  $t$  tabel dan angka sig 0,136 melampaui taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, koefisien variabel DKI tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* (TA) dan H4 ditolak. Temuan memperkuat studi Pratama & Nuryaman (2024) serta Fauzan et al. (2021) yang menginformasikan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

**H5: Keberadaan komite audit dapat mengurangi praktik *tax avoidance***

Koefisien variabel Komite Audit (KA) mengonfirmasi arah negatif -0,073. Perolehan uji statistik terhadap koefisien mengindikasikan  $t$  hitung -1,020 tidak melampaui  $t$  tabel dan angka sig 0,309 melampaui taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, koefisien variabel KA tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* (TA) dan H5 ditolak. Artinya, tinggi atau rendahnya jumlah komite audit tidak dapat menurunkan atau menaikkan besarnya *tax avoidance*. Analisis mendukung studi (Fauzan et al., 2021) yang memaparkan komite audit tidak berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Studi menginformasikan *Corporate Sustainability Reporting* dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Variabel kontrol mengindikasikan ROA berpengaruh negatif dan leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Meskipun model signifikan secara simultan, kemampuan penjelasannya masih terbatas. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dan efektivitas dewan direksi, sementara penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel dan memperluas cakupan penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat, F., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap *Tax avoidance*. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Adityaputra, S. A. (2024). Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 6(2), 122–131. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i2.6144>
- Alfatlah, H., Othman, R., Basiruddin, R., & Almagtome, A. (2022). *Taxation as a Strategy for Circular Economy Through Sustainability Reporting: The Agency Theory Perspective*. <https://www.abacademies.org/articles/taxation-as-a-strategy-for-circular-economy-through-sustainability-reporting-the-agency-theory-perspective-14041.html>
- Alvin Novanza, M., Husen, S., & Siladjaja, M. (2023). The influence of financial distress and *Good Corporate Governance* on *tax avoidance* Subjects Accounting and Auditing Reviewing Editor. *Journal of Public Auditing and Financial Management | EISSN*, 3(1), 55–68. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v3i1.1583>
- Atwiningsih, W. A., & Pujiyanto. (2023). *312-Article Text-1181-1-10-20231113*.
- Azzahra, R., & Fauzan. (2024). Pengaruh Strategi Diversifikasi, Leverage, Earning Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan. *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 1230–1242. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2736>
- Basuki, A. T. (2019). *EKONOMETRIKA PENGANTAR (Dilengkapi Penggunaan Eviews) AGUS TRI BASUKI*.
- Chandra, Y. (2022). *andy, +Journal+manager, +Jurnal +-+Yopie*.
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). THE EFFECT OF LEVERAGE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND BUSINESS STRATEGY ON TAX AVOIDANCE (CASE OF LISTED MANUFACTURING COMPANIES IN THE CONSUMPTION GOODS INDUSTRY PERIOD 2014-2019). *ACCOUNTABILITY*, 10(1), 16. <https://doi.org/10.32400/ja.33956.10.1.2021.16-26>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Penerimaan Pajak 2021 Lebih Target / Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-2021-lebih-target>
- Fauzan, Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on *Tax avoidance* Institutional Ownership on *Tax avoidance* (Empirical Study of Manufacturing (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Industry Sector Listed on the Indonesia. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2). [www.idx](http://www.idx).
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). *yogie,+SOLUSI+vol+18+no+2+bulan+april+2020\_1*.
- Franco, M., & Merton H, M. (1963). *Corporate\_income\_taxes\_and\_the\_cost\_of\_c*.
- Ghozali. (2018). *Book 2018 Ghozali / PDF*. <https://www.scribd.com/document/736967540/Book-2018-Ghozali>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *The McGraw-Hill Series Economics*.
- Haloho, S. F. R. (2021). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010a). A review of tax research. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Numbers 2–3, pp. 127–178). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010b). A review of tax research. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Numbers 2–3, pp. 127–178). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hendrianto, S. (2022). *7024-19351-2-PB*.
- Hingis Sangian, A., Savitri, D., & Siswanto, D. (n.d.). Perspektif Hukum Tentang Perbedaan Penghindaran Pajak (Legal) dan Penggelapan Pajak (Illegal) di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 2025. Retrieved <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). *30186-64984-1-SM (1)*.
- Jensen, M. C., Donaldson, G., Jacobs, A., Light, J., Smith, C., Weinhold, W., Alchian, A., & Ruback, R. (1986). *Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers*.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Also published in *Foundations of Organizational Strategy*. In *Journal of Financial Economics* (Number 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>[http://papers.ssrn.com/sol3/paper.taf?ABSTRACT\\_ID=94043](http://papers.ssrn.com/sol3/paper.taf?ABSTRACT_ID=94043)
- Kurniasih, T., Ratna, M. M., Akuntansi, S. J., & Ekonomi, F. (2013). *DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE*. 18(1).
- Lesmana, K. N., Ismail, M., Waty, L., Advent Indonesia, U., & Author, C. (2024). The Relationship of Sustainability Report, Corporate Risk, and Transfer Pricing on *Tax avoidance* Hubungan Sustainability Report, Corporate Risk, dan Transfer Pricing pada *Tax avoidance*. In *Management*

- Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 6, Number 2). <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Lifti Purba, S., Natalitha, Y., & Sembiring, B. (2021). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn/2017>
- Liliana, V., & Karina, A. (2025). 41 \* *Corresponding Author's Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating*. <https://journal.ibs.ac.id/index.php/jemp>
- Lokahita, G. A., & Saputri, S. W. (2024). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 217–229. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3031>
- Mahmudi, A., & Lismawati. (2024). *The influence of CSR, independent commissioners, and managerial ownership on tax avoidance with asset growth as moderating variable* (Vol. 2).
- Meutia, I., Kartasari, S. F., & Yaacob, Z. (2022). Stakeholder or Legitimacy Theory? The Rationale behind a Company's Materiality Analysis: Evidence from Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(13). <https://doi.org/10.3390/su14137763>
- Mulyati, Y., Sari, D., & Purnamasari, D. (2024). *KEBIJAKAN TAX AMNESTY DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN TAX RATIO DI INDONESIA* (Vol. 08, Number 02).
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). 25712-53119-1-SM.
- Pertiwi, A. (2024). IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH PADA MODEL BISNIS APLIKASI GO JEK. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 68–82. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>
- Phillips, Robert. (2005). *Stakeholder theory and organizational ethics*. Berren-Koehler Publishers Inc.
- Pratama, P., & Nuryaman. (2024). PAGE 105 <https://dinastipub> The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Earnings Management in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Org/DIJEFA*, 5(5). <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i5>
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). *Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Putri, S. A., Putu, N., Widiastuti, E., & Simorangkir, P. (n.d.). *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*. Retrieved [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, E. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance*. *Owner*, 7(2), 1283–1293.

- <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/J.JACCPU.BPOL.2007.10.003>
- Rusdiani, W. (2023). *Journal of Culture Accounting and Auditing Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax avoidance*. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Sahetapy, J. J., Prasetya, F., & Amazia, N. P. (2025). The Effect of *Good Corporate Governance on Tax avoidance*. *JAFM*, 5(6). <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6>
- Saputra, M. R., & Kurniawati, L. (2024). *JURNAL METODE UJII CLT SAMA GLEJER*.
- Sejati, D. N. P., & Kartika, I. (2025). The Impact of Board Characteristics and Audit Committee on *Tax avoidance*: Empirical Evidence from Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023. *Journal of Advanced Multidisciplinary Research*, 6(1), 54–70. <https://doi.org/10.30659/JAMR.6.1.54-70>
- Septianto, N. A., & Muid, D. (2020). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PERUSAHAAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 9(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2009). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.
- Syahroul, P., Afandi, A., & Fajarudin, I. (2023). *The Effect of Good Corporate Governance on Tax avoidance in Manufacturing Companies (Idx Empirical Study) Period 2017-2021*. <http://proceedings.worldconference.id>
- Tendi Haruman. (2008). *content*.
- Wibowo, D., Mulyono, S., Wijaya Kusuma, J., Arofah, I., Arnawisuda Ningsi, B., Saputra, E., & Purwasih, R. (2021). *Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS*.
- Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on *tax avoidance*. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 241–253. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>
- Wulandari, A., Alkausar, B., Pertiwi, A. R., Pangesti, N. G., & Soemarsono, P. N. (2025). Corporate Social Responsibility and *Tax avoidance*: Does Financial Performance Matters? *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 13(2), 201–219. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v13i2.31646>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Jaeni, J. (2024). Determinants of *Tax avoidance*: Evidence on Indonesian Financial Companies. *Owner*, 8(4), 4659–4670. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2496>
- Yendrawati, R., Mariani, H., & Hamdani, R. (2025). Examining the Factors Affecting Corporate *Tax avoidance* in Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(7), 33–42. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i71873>